

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Desa})
TAHUN 2020**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2020



**KEPALA DESA PENDOWO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2020
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/181 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Temanggung, maka desa perlu melaksanakan upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di tingkat desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa perlu diubah dengan adanya penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan desa tentang Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2);
4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari APBD

- Kabupaten Temanggung kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 52);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 54);
 7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan ADD,BHP BHR dan Dana Desa Tahun 2020 Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 6);
 8. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
 9. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 3);
 10. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2017 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes) TAHUN 2020

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

- A Penyenggaraan pemerintahan desa
- Sub Bidang Penyenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- 9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 11 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 12 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)
 - 13 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 14 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 15 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
 - 18 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 19 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 20 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
 - 21 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 22 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 23 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan
- B Pembangunan Desa
- Sub Bidang Pendidikan
- 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 4 Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa
 - Sub Bidang Kesehatan
 - 5 Penyelenggaraan Posyandu (Posbindu)
 - 6 Pembinaan GSIB
 - 7 Penyelenggaraan pemeliharaan pebinaan apotek hidup dan toga
 - 8 Fasilitasi forum kesehatan desa/kader kesehatan
 - 9 Pengelolaan PKD/Polindes
 - 10 Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 14 Pembangunan Embung Desa
 - 15 Pembangunan/Rehabilitasi Gapura/Batas Desa
 - 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - a *Pembanguan Senderan Talud Jalan Temandang I*
 - B *Pembanguan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)*
 - 17 Pembangunan gedung BUMDesa Perubahan
 - 18 Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
 - 19 Pembangunan balai posyandu
 - Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 20 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
 - 21 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
 - a *Sumber mata air / pemandian umum*
 - b *Bronjong mata air*
 - 22 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - a *Pralonisasi Dsn Kajeran*

b Pengelolaan SAB

- 23 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- 24 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- 25 Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Sub Bidang Lingkungan Hidup
- 26 Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)
- 27 Reboisasi dan penanaman turus jalan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- 28 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
- 29 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)
- 30 Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
- 31 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
- 32 Pengadaan alat-alat komunikasi Sub Bidang Pariwisata
- 33 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

C Pembinaan Kemasayarakatan

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)
- 3 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat

a JLSU

b Cadangan berobat RTM

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 4 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan
- 5 PHBI dan PHBN
- 6 Pengadaan Perlengkapan Kesenian Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- 7 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan
- 8 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
- 9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
- 10 Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 11 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- 12 Pembinaan PKK
- 13 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- 14 Pembinaan Posyandu
- 15 Pembinaan KPMD

Perubahan

D Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Perikanan

- 1 Bantuan Perikanan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)
- 3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
- 4 Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- 5 Peningkatan kapasitas kepala Desa
- 6 Peningkatan kapasitas perangkat Desa

- 7 Peningkatan kapasitas BPD
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 8 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 9 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)
 - 10 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (disabilitas)
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 11 Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - 12 Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 13 Penguatan/penyertaan modal BUMDes
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa
 - 15 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok UEP
- E Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa
- Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 Perubahan
- F Pembiayaan
- 1 Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes Perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 1 April 2020
Kepala Desa Pendowo,



Diundangkan di Desa Pendowo
Pada tanggal 1 April 2020

Sekretaris Desa Pendowo,



MN HUDA

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN DESA PENDOWO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Desa})
TAHUN 2020



DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Evaluasi Bupati melalui Camat tentang Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah
Desa Tahun 2020

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TANGGAL 1 APRIL 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2020

Lampiran Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, diubah sehingga Keseluruhan Lampiran menjadi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara partisipatif, yaitu dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa tahunan, berisi kerangka program, prioritas pembangunan desa, rencana kegiatan, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), maupun yang bersumber dari APBD atau APBN yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Termasuk prioritas rencana pembangunan desa yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah di atasnya.

Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Perubahan APB Desa Tahun 2020 dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DURKPDesa) dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020.

Sehubungan dengan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/181 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Temanggung, maka desa perlu melaksanakan upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di tingkat desasehingga perlu adanya Perubahan RKP Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RKP Desa antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
20. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 050/407 Tahun 2020 Tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung kepada Desa Tahun 2020 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Desa Pendowo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
24. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
25. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
26. Peraturan Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
27. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;

28.Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/181 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Temanggung.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan RKP Desa adalah untuk :

- 1) Pencegahan dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Desa pendowo terkait adanya wabah Covid-19;
- 2) Menjabarkan program dan kegiatan dalam RPJMDes untuk perencanaan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 3) Merumuskan arah, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan desa dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan tingkat kebutuhan, kemendesakan dan ketersediaan sumber pembiayaan;
- 4) Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan desa dalam perumusan rencana program dan pembangunan desa;
- 5) Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan rencana penganggaran;
- 6) Mendukung rencana sinkronisasi dan sinergitas dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- 7) Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- 8) Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- 9) Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPDesa

A. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPDesa dilakukan dengan sitem penilaian sendiri (*self assesment*) terhadap keluaran dan hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya hasil evaluasi dimaksud dijadikan materi dalam musrenbangdes tahun berikutnya sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Secara umum pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RKP Desa dilakukan oleh Camat dan instansi yang membidangi. BPD secara fungsional juga melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa.

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 yang telah dilakukan daam tahun anggaran berjalan masih belum sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan dan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah di atasnya dan diawasi oleh BPD serta masyarakat untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa Pendowo, adapun program kegiatan pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa belum bisa terealisasi secara umum dikarenakan timbulnya masalah dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan
-
2. Bidang Pembangunan Desa
-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
-
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- Belum adanya penganggaran

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 terhadap RPJM Desa

Tahap evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan RKP Desa pada ahir tahunnya. Hal ini mengandung maksud untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Tahap evaluasi ini menjadi umpan balik bagi perencanaan tahunan berikutnya, agar pelaksanaan pembangunan desa benar-benar diarahkan pada tercapainya visi dan misi desa. Tahap evaluasi akhir dilakukan pada akhir periode perencanaan dari RKPDes. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pembangunan desa selama 1 (satu) tahun dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa tahun 2020. Hasil evaluasi menjadi masukan dan dasar bagi penyusunan RKP Desa tahun berikutnya. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam forum musrenbangdes RKP Desa tahun berikutnya.

Dan pada tahun ini adalah tahun pertama masa jabatan Kepala Desa yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJM Desa Periode Tahun 2020-2026.

Dengan adanya keadaan darurat siaga wabah penyakit virus corono disease (covid19) di wilayah Desa Pendowo, maka program kegiatan yang masuk ke desa mengalami perubahan dan Rencana kerja pemerintahan desa perlu diubah dengan Peraturan Desa yang sekaligus sebagai acauan untuk perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Pendowo.

BAB III

VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Desa Pendowo dalam 6 (enam) tahun mendatang pada kepemimpinan Kepala Desa terpilih untuk periode RPJMDes Tahun 2014-2020.

A. Visi dan Misi Desa

Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan atau yang di cita-citakan oleh pemerintah desa masa yang akan datang, visi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dan pelaku pembangunan lainnya melihat, menilai atau memberi predikat terhadap kondisi desa yang diinginkan. Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Pendowo melalui para pemangku kepentingan pembangunan desa mempunyai harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam Visi Desa Pendowo tahun 2014-2020 yaitu :

“MENUJU DESA PENDOWO YANG AGRARIS, AGAMIS, BERBUDAYA, MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Visi Desa Pendowo merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2014-2020. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Desa Pendowo yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2020 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, BPD, pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Visi ini mengandung makna bahwa:

1. Desa yang “AGRARIS” adalah suatu desa yang secara ekonomi masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian desa dan tumpuan kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
2. “AGAMIS” adalah suatu kondisi dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma-norma agama.
3. “BERBUDAYA” adalah suatu kondisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan perumahan dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat.
4. Masyarakat yang “MAJU” berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan Desa dengan dilandasi sikap disiplin, giat bekerja dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri. Kondisi ini akan mengantarkan pada terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
5. “SEJAHTERA” adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat desa yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan dan keamanan.
6. “PEMERINTAHAN YANG BERSIH” adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai, pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus. Misi inilah yang harus diemban oleh pemerintah desa. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Dalam mewujudkan visi “Menuju Desa Pendowo yang Agraris, Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih” maka langkah-langkah atau upaya yang akan dilaksanakan dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan ekonomi desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan yang Layak;
4. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan yang Berkualitas;
5. Mewujudkan Peningkatan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Peningkatan Pelaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN dan Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat;

Melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Misi Kesatu : Mewujudkan peningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerakyatan dan kelembagaan ekonomi desa serta potensi unggulan desa yang berwawasan lingkungan, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengembangan inovasi teknologi melalui pengembangan agribisnis, agroindustri pertanian yang berwawasan lingkungan dengan pemberdayaan dan menggerakkan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, LED, koperasi dan UMKM serta potensi unggulan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Misi Kedua : mewujudkan peningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kemajuan dan kemandirian masyarakat melalui LED dengan pemberdayaan masyarakat miskin, perempuan dan pemuda disertai peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan dengan penuh toleransi tanpa meninggalkan nilai luhur budaya dan adat istiadat desa serta kondisi sosial yang bermoral, beretika, berkemampuan untuk mandiri dan berdikari.
3. Misi Ketiga : Mewujudkan peningkatan infrastruktur perdesaan yang layak, mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketersediaan aksesibilitas infrastruktur desa dengan meningkatkan kemampuan dan profesionalisme LKD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dengan menumbuhkan kembangkan swadaya dan gotro masyarakat sehingga terwujudnya pembangunan di segala bidang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Misi Keempat : Mewujudkan peningkatan pendidikan yang berkualitas, mempunyai tujuan untuk mengembangkan pendidikan, ketersediaan dan meningkatkan sarpras pelayanan dasar pendidikan untuk SDM yang bermoral, beretika dan berkualitas.
5. Misi Kelima : Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat, mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, budaya sehat dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang.
6. Misi Keenam : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, mempunyai tujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan baik dengan kualitas dan kinerja yang penyelenggara pemerintahan desa dengan memahami tugas pokok dan fungsinya secara baik untuk pelayanan prima kepada masyarakat cepat, tepat, atau prosedural, dan transparan.

B. Arah Kebijakan

Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi “Menuju Desa Pendowo yang Agraris, Agamis, Berbudaya, Maju dan Sejahtera dengan Pemerintahan Yang Bersih” melalui misi desa yang telah ditetapkan, Kebijakan Umum Pembangunan Desa Pendowo Tahun 2014-2020 yang dirumuskan meliputi :

1. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pertanian yang memberdayakan ekonomi kerayatan dan kelembagaan desa serta potensi unggulan desayang berwawasan lingkungan.
 - a. Mengembangkan Teknologi Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan untuk Penyediaan Cadangan Pangan Desa;
 - b. Mengembangkan Agribisnis, Agroindustri Pertanian yang Berbasis Potensi Unggulan Desa yang Berwawasan Lingkungan dengan Keterlibatan Lembaga Ekonomi Desa, Koperasi dan UMKM dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Desa;
2. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, maju dan sejahtera.
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Meningkatkan Kemajuan dan Kemandirian Masyarakat Miskin;
 - b. Mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa BUMDes yang Mandiri dan Tangguh untuk Memberikan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Masyarakat;
 - c. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda serta Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. Meningkatkan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan;
 - e. Melestarikan Budaya dan Adat Istiadat Desa;
 - f. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa;
3. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan infrastruktur perdesaan yang layak.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur bagi Pengembangan Ekonomi;
 - b. Meningkatkan Kemampuan dan Profesionalisme Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Menumbuhkembangkan Swadaya dan Gotro Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan;
 - c. Meningkatkan Lingkungan Hunian Sehat dan Bersih;
 - d. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan pendidikan yang berkualitas.
 - a. Mengembangkan Nilai dan Norma melalui Pendidikan;
 - b. Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Pendidikan Dasar beserta Pendidiknya;
5. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnyapeningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.
 - a. Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Budaya Sehat;
6. Kebijakan umum yang terkait dengan terwujudnya peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak kkn dan berorientasi pada pelayanan masyarakat;
 - a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Kualitas dan Kinerja yang Penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Pengelolaan serta Tertib Administrasi Keuangan Desa dan Pelayanan Umum Lainnya dengan Informasi dan Komunikasi yang Transparan dan Bersih;

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Dikelola oleh Desa

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Pendowo maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan *outcome* sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan desa yaitu urusan penyelenggaraan pemerintah desa, urusan pembangunan desa, urusan Pembinaan kemasyarakatan dan urusan pemberdayaan masyarakat. Sehingga dalam RPJM-Desa terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yang dilaksanakan selama kurun waktu 6 (enam) tahun, adapun perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- A Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 5 Penyediaan Tunjangan BPD
 - 6 Penyediaan Operasional BPD
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Penyediaan Penghasilan Lainnya (tanah bengkok)
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 9 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 11 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 - 12 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (IDM)
 - 13 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 - 14 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 - Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 15 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 16 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 - 17 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes)
 - 18 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes)
 - 19 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - 20 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades)
 - 21 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 22 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 23 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan
- B Pembangunan Desa
 - Sub Bidang Pendidikan
 - 1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
 - 2 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
 - 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPQ/Madrasah Non-Formal

- 3 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
 - 4 Pembangunan/pemeliharaan TK milik desa
Sub Bidang Kesehatan
 - 5 Penyelenggaraan Posyandu (Posbindu)
 - 6 Pembinaan GSIB
 - 7 Penyelenggaraan pemeliharaan pebinaan apotek hidup dan toga
 - 8 Fasilitas forum kesehatan desa/kader kesehatan
 - 9 Pengelolaan PKD/Polindes
 - 10 Fasilitas Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT
 - 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - 14 Pembangunan Embung Desa
 - 15 Pembangunan/Rehabilitasi Gapura/Batas Desa
 - 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi
 - a *Pembanguan Senderan Talud Jalan Temandang I*
 - B *Pembanguan Senderan Talud Jalan Pendowo Legok (Masjid)*
 - 17 Pembangunan gedung BUMDesa Perubahan
 - 18 Pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan
 - 19 Pembangunan balai posyandu
Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 20 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/RTLH
 - 21 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
 - a *Sumber mata air / pemandian umum*
 - b *Bronjong mata air*
 - 22 Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - a *Pralonisasi Dsn Kajeran*
 - b *Pengelolaan SAB*
 - 23 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
 - 24 Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - 25 Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
Sub Bidang Lingkungan Hidup
 - 26 Pemanfaatan lahan pekarangan (tani pekarangan dan peternakan)
 - 27 Reboisasi dan penanaman turus jalan
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - 28 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
 - 29 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Smart Service)
 - 30 Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 31 Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanahan)
 - 32 Pengadaan alat-alat komunikasi
Sub Bidang Pariwisata
 - 33 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- C Pembinaan Kemasayarakatan
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
- 1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban (Satlinmas desa)
 - 3 Koordinasi Pembinaan Ketentrman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat

	<i>a JLSU</i>	
	<i>b Cadangan berobat RTM</i>	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
4	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan	
5	PHBI dan PHBN	
6	Pengadaan Perlengkapan Kesenian	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
7	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	
8	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga	
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga	Perubahan
10	Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Kepemudaan dan Olah Raga	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
11	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
12	Pembinaan PKK	
13	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	
14	Pembinaan Posyandu	
15	Pembinaan KPMD	
D	Pemberdayaan Masyarakat	
	Sub Bidang Perikanan	
1	Bantuan Perikanan	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	
3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
4	Pengadaan/pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana pertanian dan peternakan	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
5	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
6	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
7	Peningkatan kapasitas BPD	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
8	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	
9	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Stunting)	
10	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (disabilitas)	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	
11	Pengembangan Sarpras Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	
12	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa, BID)	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
13	Penguatan/penyertaan modal BUMDes	
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Desa	
15	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok UEP	
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Perubahan
	- Penanganan dan Penanggulangan Covid 19	
F	Pembiayaan	
1	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDes	Perubahan

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga oleh pemerintah Desa Pendowo adalah Pembangunan Kawasan Perdesaaan (PKP) yang di tetapkan dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa Bersama tentang Kerja Sama BUMDes Bersama meliputi Desa Pendowo, Ngropoh, Purwosari, Kramat dan Desa Sanggrahan. Adapun kegiatannya berupa penguatan modal usaha bersama antar BUMDes 5 (lima) desa yang tergabung dalam BUMDesa Bersama Ngromat Sangpurwo Makmur dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes Desa Pendowo dan BUMDes Bersama.

Dengan adanya wabah covid 19 ini maka penguatan modal BUMDesa bersama mengalami perubahan yang mana pada tahun ini ditiadakan untuk penanganan wabah covid 19.

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Prioritas program dan kegiatan tahun 2020 yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah Desa Pendowo sebagai berikut :

- 1 Dari Pemerintah Pusat (APBN)
 - a. Pembangunan Ruah Tidak Layak Huni (RTLH program BSPS)
- 2 Dari Pemerintah Daerah Provinsi (APBD Prov)
 - a. Peningk. Kap pokmas melalui KPMD (Bidang Pemberdayaan)
 - b. Bankeu Ketahanan Masyarakat Desa (Bidang Pemberdayaan), melalui pembangunan RTLH dan Pengadaan Sarpras Polindes
 - c. Pembangunan Infrastruktur Desa, melalui Pembangunan Drainase Dsn Temandang I dan Pembangunan Senderan Talud Jalan Dsn Temandang – Pendowo yang merupakan program lanjutan
- 3 Dari Pemerintah Daerah Kabupaten (APBD Kab)
 - a. RS RTLH dari Dinas Sosial (Bidang Pembangunan)
 - b. Jaminan sosial penyandang cacat berat dan ganda (Bidang Pemberdayaan)
 - c. Jaminan Sosial Lansia Non Potensial (Bidang Pemberdayaan)
 - d. Pembangunan Jamban keluarga (Bidang Pembangunan)
 - e. Bantuan Penyelenggaraan Pilkades (Bidang Pemerintahan)
 - f. Insentive Rt Rw (Bidang Pemerintahan)
- 4 Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten
 - a. Pembangunan Rabat Beton dan Drainase Dsn Temandang II (Bidang Pembangunan)
 - b. Praonisasi Dsn Kajeran (Bidang Pembangunan)

BAB V
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP Desa DESA PENDOWO TAHUN 2020

A. Prioritas Program dan Kegiatan yang Diusulkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pelatihan komputerisasi perangkat desa'
 - 2 Pendataan Tanah Kas Desa
 - 3 Pengadaan Sarpras Arsip Desa
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 Pembangunan sarpras air bersih
 - 2 Pemb trotoar jalan antar desa
 - 3 Rehab jembatan antar desa / kec
 - 4 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 5 Drainase jalan Ds Pendowo - Ds Ngropoh
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes (Lembaga Ekonomi Desa)
 - 2 Pengadaan sarpras lembaga desa (LKD)
 - 3 Pembangunan Gedung Posyandu
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Fasilitasi dan Pelatihan kelompok tani (ternak)
 - 2 Pengembangan pertanian terpadu berkelanjutan
 - 3 Peningkatan Kapasitas Kader KB, Posyandu
 - 4 Peningkatan budidaya dan pengolahan hasil perikanan
 - 5 Bantuan RTLH
 - 6 Pelatihan dan Bantuan modal usaha RTM
 - 7 Pelatihan kewirausahaan

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2020 di Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2020, adalah :

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pengadaan sarpras kantor desa
 - 2 Pengelolaan arsip
- 2) Pembangunan Desa
 - 1 Pemb Jembatan Girimulyo-Gentan
 - 2 Pemb Rabat beton Girimulyo-Gentan
 - 3 Pemb irigasi tersier
 - 4 Pemb lumbung desa
 - 5 Pemb jalan alternatif Pendowo Kranggan Badran
 - 6 Pemeliharaan lapangan desa
 - 7 Pemb Jalan Usaha Tani Giri - Purwosari
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1 Pelatihan BUMDes
 - 2 Pengadaan sarpras olah raga
 - 3 Pemb Kawasan Agro bisinis
- 4) Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Bantuan ternak desa
 - 2 Bantuan modal RTM

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kawasan Perdesaan mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan kawasan perdesaan harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang mempunyai tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan.

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan anatara lain :

- A Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Ketahanan Pangan
 - 1 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pakan ternak
 - 2 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan pupuk organik padat dan cair
 - 3 Pembangunan Pabrik Mini pengolahan limbah sampah organik
 - 4 Pembangunan Embung
 - 5 Pembangunan Instalasi Biogas kerumah dan Peralatan Konversi ke dalam bentuk tabung atau lainnya
 - 6 Pengadaan bibit padi, palawija (jagung, Kedelai, ketela pohon, ubi jalar dan Kacang tanah) dan hortikultura (cabai, bawang merah, tomat, aneka jenis sayuran)
 - 7 Pengadaan obat pembasmi hama wereng dan tikus beserta peralatan berupa jaring
 - 8 Pengadaan Ultivator
 - 9 Pengadaan Bibit Domba, Kambing, Sapi
 - 10 Pengadaan bibit unggul tanaman kopi dan pelatihan cara menanam dan menanggulangi hama penyakit tanaman kopi
 - 11 Pengadaan Bibit Ikan air tawar (nila, mujahir, lele, belut dan patin)
 - 12 Pengadaan Bibit ayam ras dan ayam buras
 - 13 Pengadaan bibit kelapa genjar mentok dan kelapa hibrida yang unggul
 - 14 Pelatihan budidaya jamur tiram dan tambah modal usaha
 - 15 Pelatihan tentang pemanfaatan lahan pertanian tepat guna (Kebun Bibit Desa) & Pengadaan bibit
 - 16 Pelatihan dan Demplot Pertanian serta Perkebunan dan sekolah Lapangan tentang teknologi pertanian
 - 17 Pelatihan Budidaya Kesehatan Hewan Ternak dan Unggas
 - 18 Pelatihan Pembuatan pakan ternak dan bantuan peralatan
 - 19 Pelatihan dan Pengadaan Pohon Buah-buahan, tanaman obat, rempah-rempah dan kayu sengon
- B. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian menjadi makanan olahan khas produk unggulan kawasan perdesaan dan bantuan peralatan
 - 2 Pelatihan pembuatan & kemasan produk : Rengginang, renggenek, patolo, emping teja, krupuk, kripik : singkong, pisang, nangka dan talas dan bantuan peralatan
 - 3 Pelatihan Pemasaran dan Kewirausahaan
 - 4 Pelatihan pembuatan kemasan produk unggulan kawasan perdesaan
 - 5 Pelatihan Manajemen keuangan dan marketing dengan berbasis Teknologi
 - 6 Penguatan Kapasitas BUMDESA & BUMDESA Bersama
 - 7 Pelatihan Kerajinan bambu, pembuatan handicraft dan aksesoris, bantuan peralatan serta modal usaha
 - 8 Pelatihan Pembuatan minuman herbal instant dari tanaman empon-empon (jahe, kunyit, temulawak, dll), bantuan peralatan dan modal usaha
 - 10 Pelatihan pengolahan durian menjadi grubi, bantuan peralatan dan permodalan
 - 11 Pelatihan Membatik, bantuan peralatan dan permodalan

12 Pelatihan Menjahit, bantuan peralatan dan permodalan

C. Perekonomian

- 1 Pembangunan Outlet produk unggulan kawasan perdesaan
- 2 Bantuan Modal Usaha BUMDesa/ BUMDesa Bersama
- 3 Pembangunan Kios Desa Kawasan

D. Pariwisata

- 1 Pembangunan kolam renang
- 2 Taman desa dan kuliner

E. Infrastruktur

- 1 Pembangunan Jembatan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 2 Pembangunan Jalan Dsn Giri Mulyo Pendowo - Dsn. Wonogiri Gentan
- 3 Pembangunan Jalan Dsn. Legok Pendowo - Dsn. Bangunsari Badran
- 4 Pembangunan trotoar Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 5 Rehab Jalan Aspal Ds. Pendowo - Ds. Ngropoh
- 6 Rehab Jalan Aspal Kelurahan Kranggan - Ds. Purwosari
- 7 Rehab Jalan Aspal Dsn. Temandang I Pendowo - Ds. Sanggrahan
- 8 Pembangunan JUT Dsn. Krajan Ds. Sanggrahan - Dsn. Temandang Ds. Pendowo
- 9 Pembangunan JUT Dsn. Girimulyo Pendowo - Ds Purwosari
- 10 Pembangunan gedung serba guna dan olah raga
- 11 Penambahan Daya Listrik

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan umum, program, dan kegiatan Desa Pendowo untuk kurun waktu 1 (satu) selanjutnya menjadi pedoman, arah, dan dasar penyusunan APB Desa tahun berjalan dan DURKP Desa dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan tahun berjalan. RKP periode tahun 2020 ini merupakan rancangan yang diinformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan sampai dengan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, yang dilengkapi dengan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian keberhasilan, baik melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan, kebijakan keuangan, kebijakan lingkungan dan kebijakan-kebijakan lainnya. Namun demikian kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan ini mesti akan ada sehingga sedikit akan tidak sesuai dengan capaian visi dan misi. Oleh karena itu perlu kiranya diadakan koreksi atau revisi dan disusun langkah-langkah yang lebih tepat dan strategis, agar kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan perencanaan ini dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di desa dan sesuai dengan visi serta misi desa, sehingga penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan akan dapat terlaksana lebih baik lagi.

Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Pendowo Tahun 2020 ini ini menindaklanjuti ditetapkannya Keputusan Bupati Temanggung Nomor 360/181 Tahun 2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Temanggung, maka desa perlu melaksanakan upaya pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 di tingkat desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan dan tahun 2020 merupakan periode tahun ke satu atau periode pertama bagi Kepala desa masa bhakti tahun 2020-2026, sehingga Visi dan Misi Kepala Desa sangatlah berpengaruh dengan perkembangan pembangunan di Desa Pendowo untuk tahun-tahun mendatang. Di Tahun ini pula desa mendapatkan dana desa dari alokasi APBN sehingga untuk perencanaan pembangunan mengalami perubahan untuk sumber pendanaan dan perlu adanya revisi dalam perencanaan pembangunan di desa.

Dengan satu harapan Desa Pendowo selama waktu 1 (satu) tahun mempunyai acuan serta rambu-rambu yang jelas dalam bidang pembangunan dengan terselesainya RKP Desa ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak pemerintah desa, BPD, Lembaga Desa, Kader Desa, Tokoh Masyarakat, serta semua pihak yang turut serta membantu dan mendukung kegiatan ini.

Kepala Desa Pendowo,



TURKAMUN